**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG PELAKSANA AN PEMBANGUNAN DI DESA DEMPAR KECAMATAN NYUATAN KABUPATEN KUTAI BARAT**

**Marta Yuliani**

**16.11.1001.3509.167**

Drs. H. Maskan AF. M.Si dan Wesley Liano Hutasoit, S.Sos, M.SP

Administrasi Negara, Fisipol, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia.

**ABSTRAK**

 Marta Yuliani NPM 16.11.1001.3509.167 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Dempar Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat.

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan deskritif kualitatif yang bertempat di Desa Dempar Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat. Subjek dari Penelitian ini diambil sampel sebanyak dua belas orang yang terdiri dari tiga orang pegawai kantor desa, dua orang tokoh masyarakat, lima orang anggota masyarakat dan dua orang tokoh agama. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan bahan-bahan kepustakaan. Fokus penelitian ini meliputi tahap assesment, tahap alternatif program kegiatan, tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan, dan tahap evaluasi (termasuk evaluasi input, proses, dan hasil). Teknik anlisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dengan fokus penelitian partisipasi masyarakat dan pelaksanaan pembangunan maka dapat ditarik kesimpulan, partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan sudah diterapkan dan terealisasi dengan cukup baik dan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, pemerintah desa yang ikut mendukung pelaksanaan pembangunan telah melakukan tugasnya dengan baik dan sangat ramah serta bersikap terbuka terhadap masyarakat, sehingga masyarakat sangat terbantu dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

Sedangkan untuk kendalanya, sesuai dengan fokus penelitian masyarakat dan pemerintah desa seringkali tidak mendapatkan bahan-bahan material yang diperlukan dikarenakan terkendalanya jarak dari desa ke kota serta sulitnya mendapatkan transportasi sehingga menghambat pelaksanaan pembangunan tersebut dan memperlambat proses pengerjaannya.

**Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pelaksanaan Pembangunan**

1. **PENDAHULUAN**

Dalam menjalankan roda pemerintahannya setiap negara selalu berpbn edoman pada kebijakan politik yang dianut negara ini, sehingga prosedur birokrasi yang ditempuh juga mengacu kepada paradigma sistem politik yang dianutnya.

Seiring dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang kemudian diperbaiki menjadi undang-undang nomor 32 tahun 2004, paradigma birokrasi di indonesia mengalami perubahan dari paradigma pemerintahan yang sentralistik ke arah desentralistik.

Pada kenyataannya desentralisasi diminati banyak orang karena di dalamnya terkandung semangat demokrasi, yang ujungnya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya penyelenggaraan pembangunan (Arif, 2006:23).

Dengan demikian, harapan masyarakat untuk merealisasikan pembangunan dalam rangka perubahan kondisi masyarakat dari suatu realita ke realita yang secara keseluruhan lebih baik, akan tercapai melalui konsep yang lebih mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, sebagaimana falsafah yang terkandung di dalam otonomi daerah tersebut, yaitu partisipasi masyarakat.

Partisipasi merupakan proses pemberdayaan masyarakat, sehingga mampu menyelesaikan sendiri masalah yang mereka hadapi, melalui kemitraan,transparansi, kesetaraan, dan tanggung jawab.

Partisipasi publik dalam kebijakan pembangunan di negara-negara yang menerapkan demokrasi termasuk di Indonesia bukanlah hal yang baru. Sebagai suatu konsep dan praktek pembangunan, konsep partisipasi baru dibicarakan pada tahun 60-an ketika berbagai lembaga internasional mempromosikan partisipasi dalam praktek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

Di Indonesia, landasan hukum pelaksanaan partisipasi masyarakat adalah UUD 1945 yang menyebutkan bahwa partisipasi adalah hak dasar warga negara, dan partisipasi politik sebagai prinsip dasar demokrasi.

Presiden Suharto sejak tahun 1966 menerapkan konsep partisipasi masyarakat dalam program pembangunan dan sesuai dengan paradigma pemerintahan orde baru yang sentralistik, seluruh kebijakan pembangunan dilakukan secara *“top-down”.* inisiatif dalam menetapkan kebijakan pembangunan berasal dari atas (pejabat berwenang) tanpa melibatkan masyarakat dan stakeholder lainnya.

Dalam kaitannya dengan ini, masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan terutama dalam membantu dana maupun tenaga. Pada saat itu partisipasi dipandang sebagai proses mobilisasi yaitu penggerakkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Meskipun model ini memiliki keunggulan karena pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara cepat, namun kelemahan yang dijumpai adalah masyarakat sering merasa tidak memiliki dan tidak merasakan manfaat dari kegiatan pembangunan itu.

Berdasar pada uraian dalam latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan aspek-aspek yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam judul: **“Partisipasi Masyarakat Dalam** **Mendukung Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Dempar Kabupaten Kutai Barat”.**

**1.2. Rumusan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Dempar Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat ?

**II. Teori dan Konsep**

 Sebagai titik tolak atau landasan berpikir dalam menyoroti atau memecahkan masalah, maka perlu adanya pedoman teoritis yang dapat membantu. Landasan teori perlu ditegaskan agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan yang sifatnya coba-coba *(trial and error),* (Sugiyono, 2004:55).

**2.1.1. Pengertian Partisipasi Masyarakat**

Pengertian partisipasi selalu dikaitkan atau bersinonim dengan peran serta. Seorang ilmuan yang bernama Keith Davis mengemukakan definisinya tentang partisipasi yang dikutif oleh R.A. Santoso Sastropoetro (2001:13) sebagi berikut “Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran atau moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan”.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas,maka partisipasi itu tidak berdasarkan pada keterlibatan secara fisik dalam pekerjaannya tetapi menyangkut keterlibatan diri seorang sehingga akan menimbulkan tanggung jawab dan sumbangan yang besar terhadap kelompok. Sejalan dengan pendapat diatas, Gordon W. Allpot (Santoso Sastropoetro, 2001:12) menyatakan bahwa: “Seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya/ego yang sifatnya lebih daripada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja, dengan keterlibatan dirinya berartiketerlibatan pikiran dan perasaan”

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, maka ada tiga buah unsur penting dalam partisipasi yaitu :

1. Partisipasi merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan,lebih dari semata-mata atau hanya terlibat secara jasmaniah.
2. Ketersediaan memberi suatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok, ini berarti terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok.
3. Dalam partisipasi harus ada tanggung jawab, unsur tanggung jawab ini merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota.

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa partisipasi menyangkut keterlibatan diri/ego dan tidak semata-mata keterlibatan fisik dalam pekerjaan atau tugas saja, dan ketiga unsur partisipasi tersebut didalam realitanya tidak akan terpisahkan satu sama lain, tetapi akan saling menunjang, dalam realitasnya terutama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsan dan bernegara istilah partisipasi ini sering dikaitka\n dengan usaha di dalam mendukung program pembangunan. Hal ini sesuai dengan pendapa t yang dikemukakan oleh santoso S. Hamidjoyo (2006:67) bahwa partisipasi mengandung tiga pengertian, yaitu :

1. Partisipasi berarti turut memikul beban pembangunan.
2. Menerima kembali hasil pembangunan dan tanggung jawab terhadapnya
3. Partisipasi berarti terwujudnya kreativitasnya dan oto aktivitas.

 Dari ketiga hal tersebut di atas, jelas bahwa masalah partisipasi ini sangat urgen, lebih-lebih dalam pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu partisipasi aktif segenap lapisan dalam membangun harus semakin luas dan merata, baik dalam memikul beban pembangunan maupun didalam menerima hasil pembangunan.

Dari beberapa kajian literature tentang partisipasi masyarakat di negara-negara berkembang menunjukan bahwa konsep partisipasi diinterpretasikan secara luas. Oakley (2001:1) mengartikan partisipasi kedalah tiga bentuk yaitu :

1. Partisipasi sebagai bentuk kontribusi, yaitu interprensi dominan dari partisipasi dalam pembangunan di dunia ketiga adalah melihat sebagai suatu keterlibatan secara sukarela atau bentuk kontribusi lainnya dari masyarakat desa menetapkan sebelumnya program dan proyek pembangunan .
2. Partisipasi sebagi organisasi, meskipun diwarnai dengan perdebatan yang panjang diantara para praktisi dan teoritisi mengenai organisasi sebagai instumen yang fundamental bagi partisipasi, namun dapat dikemukakan bahwa perbedaan organisasi dan partisipasi terletak pada hakekat bentuk organisasional sebagai sarana bagi partisipasi, seperti organisasi-organisasi yang bias dibentuk atau organisasi yang muncul dan dibentuk sebagai hasil dari adanya proses partisipasi, selanjutnya dalam melaksanakan partisipasi masyarakat dapat melakukanya melalui beberapa dimensi , yaitu :
3. Sumbangan pikiran (ide atau gagasan)
4. Sumbangan materi (dana,barang,alat)
5. Sumbangan tenaga (bekerja atau memberi kerja)
6. Memanfaatkan/melaksanakan pelayanan pembangunan
7. Partisipasi sebagai pemberdayaan, partisipasi merupakan latihan Pemberdayaan bagi masyarakat desa, meskipun sulit di definisikan. Akan tetapi, pemberdayaan merupakan upaya untuk mengembangkan ketrampilan dan kemampuan masyarakat desa untuk memutuskan dan ikut terlibat dalam pembangunan.

Menurut Soetrisno (2000:221) bahwa secara umum, ada dua jenis definisi yang beredar di masyarakat, yaitu :

1. Partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadapa rencana/proyek yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana.ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam definisi inipun diukur dengan kemauan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan, baik berupa uang meupun tenaga dalam melaksanakan pembangunan.
2. Partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencanaan dan rakyat dalam merencanakan,melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam pembangunan tidak hanya dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi juga dengan ada tidaknya hak rakyat untuk ikut menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun diwilayahnya. Ukuran lain yang dapat digunakan adalah ada tidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkan hasil proyek itu.

Definisi mana yang dipakai akan sangat menentukan keberhasilan dalam mengembangkan dan memasyarakatkan system pembangunan wilayah yang partisipatif. Dalam sosiologi definisi pertama merupakan suatu bentuk lain dari mobilitas rakyat dalam pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, maka partisipasi masyarakat menjadi elemen yang penting dalam pengembangan masyarakat. Menurut Adi (2001:208) partisipasi masyarakat atau ketertiban warga dalam pembangunan dapat dilihat dalam 4 (empat) tahap yaitu :

1. ***Tahap Assesment***

Dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan sumberdaya yang dimiliki untuk ini, masyarakat dilibatkan secara aktif melihat permasalahan yang sedang terjadi, sehingga hal tersebut merupakan pandangan mereka sendiri.

1. ***Tahap Alternatif Program atau Kegiatan***

Dilakuakan dengan melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan cara mengatasinya dengan memikirkan beberapa alternative program.

1. ***Tahap Pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan***

 Dilakukan dengan melaksanakan program yang sudah direncanakan dengan baik agar tidak melenceng dalam melaksanakannya dilapangan.

1. ***Tahap Evaluasi (termasuk evaluasi input, proses dan hasil)***

Dilakukan dengan adanya pengawasan dari masyarakat dan petugas terhadap program yang sedang berjalan.

Dengan beberapa definisi yang telah disebutkan diatas, maka dalam penelitian ini definisi partisipasi masyarakat yang dimaksud oleh peneliti, yakni keikutsertaan/keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dengan memberikan sumbangan ide terhadap proyek pembangunan yang akan dilaksanakan, dimana dalam hal ini masyarakan berpungsi sebagai subjek sekaligus sebagi objek pembangunan yang mengetahui betul kondisi daerahnya sendiri, sehingga pembangunan yang nantinya dilaksanakan di daerah mereka betul-betul seperti yang mereka butuhkan.

* + 1. **Bentuk Dan Jenis Partisipasi Masyarakat**
1. **Bentuk-bentuk Partisipasi**

Selanjutnya Keith Davis (Sastropoetro, 2001:55) mengemukakan pula tentang bentuk partisipasi yaitu :

1. Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa.
2. Sumbangan spontan berupa uang dan barang.
3. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan honornya berasal dari sumbangan individu atau instansi yang ada diluar lingkungan tertentu (darmawan atau pihak ketiga) dan itu merupakan salah satu partisipasi dan langsung akan langsung dirasakan masyarakat itu sendiri dalam pembangunan desa itu sendiri.
4. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai sepenuhnya oleh komuniti (biasanya oleh komuniti dalam rapat desa yang menentukan anggarannya).
5. Sumbangan dalam bentuk kerja, yang biasanya dilakukan oleh tahap ahl setempat, bentuk kerja yang disumbangkan oleh masyarakat akan memperingankan pembangunan yang diselenggarakan didesa tersebut.
6. Aksi masa.
7. Mengadakan pembangunan dikalangan keluarga sendiri.
8. Membangun proyek komuniti yang sifatnya otonom.

Dalam hal partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa, Ndraha,Hasbiah (2018:15) juga mengemukakan tentang bentuk-bentuk partisipasi yaitu sebagi berikut:

1. Partisipasi dalam bentuk swadaya murni dari masyarakat dalam hubungan dengan pemerintah desa, sepeti jasa/tenaga, barang maupun uang.
2. Partisipasi dalam penerimaan/pemberian informasi.
3. Partisipasi dalam bentuk pemberian gagasan.
4. Partisipasi dalam bentuk nilai pembangunan.
5. Partisipasi dalam bentuk pelaksanaan oprasional pembangunana
6. **Jenis-jenis Partisipasi**

Menurut Davis, seperti yang dikutip oleh Sastropoetro (2001:16) mengemukakan jenis-jenis partisipasi masyarakat, yaitu sebagai berikut :

1. **Pikiran *(Psychological Participation)***
2. **Tenaga *(Physical Participation)***
3. **Keahlian (*Participation with skill)***
4. **Barang (*Material participation)***
5. **Uang (*Money participation)***
	* 1. **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi**

Ada beberapa factor yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat, baik berupa faktor pendorong maupun faktor penghambatnya. Faktor pendorong yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Subrata dan Atmajaya dalam Sopino (2002:32) adalah sebagi berikut :

1. Adanya interes dan partisipan.
2. Hadiah dari suatu kegiatan.
3. Adanya keuntungan dari kegiatan
4. Motivasi dari luar.

Selanjutnya terdapat pula faktor lain yang dapat mewarnai dan turut berperan dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat yaitu, pemuka masyarakat/tokoh masyarakat, seperti dikemukakan Mutadi dalam Sopino (2002:33) sebagi berikut : “Dalam pembangunan masyarakat peranan mereka yang tergolong informal leader sangat besar perannya. Mereka mempunyai pengaruh yang besar terhadap rakyat desanya. Kadang-kadang suatu program pemerintah dapat gagal karena tidak mengikutsertakan para pemuka masyarakat”.

Dengan demikian dapat diketahui pula bahwa partisipasi masyarakat pun dipengaruhi oleh adanya seorang yang menjadi pendorong atau motivator dalam suatu kegiatan.

* + 1. **Pengertian Pembangunan**

Todaro (Hasbiah 2018:21) menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia.

Todaro (Hasbiah 2018:23), mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lebaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan, Menurut todaro (2000:21) definisi diatas memberikan beberapa implikasi bahwa :

1. Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk menigkatkan *income,* tetapi juga pemerataan.
2. Pembangunan juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan, seperti peningkatan :
3. *Life sustenance :* Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
4. *Self-*Esteem : Kemampuan untuk menjadi orang yang utuh yang memiliki harga diri, bernilai, dan tidak “diisap” orang lain.
	1. *Freedom From Survitude :* Kemampuan untuk melakukan berbagai pilihan dalam hidup, yang tentunya tidak merugikan orang lain.

Konsep dasar diatas telah melahirkan beberapa arti pembangunan yang sekarang ini menjadi populer (Todaro, 2000:24) yaitu :

1. *Copaty,* hal ini merupakan aspek kemampuan meningkatkan income atau produktifitas.
2. *Equity,* hal ini menyangkut pengurangan kesenjangan antara berbagai lapisan masyarakat dan daerah.
3. *Empowerment,*hal ini menyangkut pemberdayaan masyarakat agar dapat menjadi aktif dalam memperjuangkan nasibnya dan sesamanya.
4. *Suistanable,*hal ini menyangkut usaha untuk menjaga kelestarian pembangunan.

Menurut Rostow dalam Arif (2000:29) pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih banyak output yang dihasilakan,tetapi juga lebih banyak jenis output dari pada yang diproduksi sebelumnya. Dala perkembang nya pembangunan melauli tahapan-tahapan : masyarakat tradisional, prakondisi lepas landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran. Kunci tahap ini adalah tahap tinggal landas didorong oleh satu sector atau lebih (Arief 2000:30)

Sondang P. Siagian (2005:25) mendefinisikan pembangunan adalah : “ Suatu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah dalam usaha pembinaan bangsa.”

 Berdasarkan pendapat tersebut, maka dalam konsep pembangunan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yakni: harus ada usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah, dilaksanakan secara sadar, terarah dan berkesinambungan agar tujuan dari pembangunan itu dapat tercapai.

* + 1. **Tahap-tahap Perencanaan Pembangunan Daerah**

Menurut Blakely ada 6 tahap dalam proses pembanguna ekonomi daerah seperti yang disajikan di tabel 2.2 berikut ini, tahapan yang berurutan tersebut meliputi: (1) pengumpulan dan analisi data; (2) Pemilihan strategi pembangunan daerah; (3) Pemilihan proyek-proyek pembangunan; (4) Pembuatan rencana tindakan; (5) Penentuan rincian proyek; (6) Persiapan perencanaan secara keseluruhan dan implementasi.

Pembangunan desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Dengan demikian desa merupakan titik sentral dari pembangunan nasional Indonesia. Oleh karna itu, pembangunan desa tidak mungkin bias dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan.

Dalam merealisasikan pembangunan desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan perlu memperhatikan beberapa pendekatan dengan ciri-ciri khusus yang sekaligus merupakan identitas pembangunan desa itu sendiri, seperti dikemukakan oleh Utang Rosidin (2019:193) yaitu :

1. Komprehensif multisektoral yang meliputi berbagai aspek, baik kesejahteraan maupun aspek keamanan dengan mekanisme dan system pelaksanaan yang terpadu antar berbagai kegiatan pemerintahan dan masyarakat.
2. Perpaduan sasaran sektoral dengan regional dengan kebutuhan esensial kegiatan masyarakat.
3. Pemerintahan dan penyebarluasan pembangunan keseluruhan pedesaan termasuk desa-desa diwilayah kelurahan.
4. Satu kesatuan pola dengan pembangunan nasional, regional, daerah pedesaan dan daerah perkotaan serta antara daerah pembangunan wilayah sedang dan kecil.
5. Menggerakan partisipasi, prakras dan swadaya gotong royong masyarakat

serta mendinamisir unsur-unsur kepribadian dengan teknologi tepat waktu

**IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

* 1. **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**
		1. Geografi dan Topografi Kabupaten Kutai Barat

Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu dari 10 Kabupaten atau Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Barat dengan Ibukota Sendawar hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Kutai yang telah ditetapkan berdasarkan UU Nomor 47 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai timur dan Kota Bontang tertanggal 4 Oktober 1999. Secara simbolis diresmikan oleh Mentri dalam Negri R.I. pada 12 Oktober 2009 di Jakarta secara oprasional diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Timur pada tanggal 5 November 1999 di sendawar.

Secara geografis Kabupaten Kutai Barat terletak antara 114°44’59,05”-116°07’15,23” Bujur Timur, 00°07’54,50” Lintang Utara dan 01°08’58,18” Lintang selatan. Luas wilayah Kabupaten Kutai Barat Mencapai 20.381,59 Km2 atau kurang lebih 15,79 % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Secara administrative.

**Batas-batas wilayah Kabupaten Kutai Barat**

* disebelah utara : Kabupaten Mahakam Hulu
* sebelah Timur : Kabupaten Kutai Kartanegara
* sebelah selatan : Kabupaten Panajam Paser Utara
* sebelah Barat : provinsi Kalimantan Tengah.

Sebelum pemekaran jumlah kecamatan dikabupaten Kutai Barat sebanyak 21 Kecamatan terdiri dari 236 kampung dari kelurahan. Namun setelah keluarnya undang-undang No. 2 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur Maka 5 Kecamatan yaitu Long Apari, Long Bagun, Laham dan Long Hubung secara resmi menjadi Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, sehingga jumlah Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat Berkurang menjadi 16 Kecamatan.

* 1. **Hasil Penelitian**

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah yang diharapkan, diperlukan keterlibatan seluruh komponen masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan infrakstruktur fisik adalah kesadaran yang tidak bisa muncul dengan sendirinya.

Oleh karena itu kesadaran tersebut harus dibimbing dan diarahkan sampai mereka bisa mencapai kemandiriannya sendiri. Dengan adanya keterlibatan itu, maka suatu pembangunan akan bisa dirasakan secara merata, dan tidak hanya dioleh pihak-pihak tertentu saja. Pembangunan yang tidak merata adalah karena adalah suatu pembangunan sudah tak memandang arti pentingnya keterlibatan subyek dalam menyelenggarakan pembangunan itu sendiri.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrakstruktur fisik daerah sangat diharapkan guna memberikan masukan kepada pemerintah daerah apa sebenarnya yang mereka butuhkan. Atau, partisipasi juga haru ada ketika pemerintah daerah membutuhkan sebagian dari hak milik mereka dengan ditukar dengan nilai yang sepadan. Partisipasi bisa muncul melalui kelompok-kelompok lembaga swadaya masyarakat, kelompok-kelompok adat, ataupun satuan-satuan masyarakat yang lebih kecil lainnya. Adanya dukungan dari mereka merupakan dorongan bagi pemerintah daerah untuk mengklarifikasikan sekaligus memenuhi kebutuhan dasar mereka. Karena itu, tanpa adanya partisipasi, maka dipastikan suatu daerah tidak akan bisa melaksanakan pembangunan daerah dengan baik, apapun bentuk pembangunan yang akan dikerjakan.

Menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan memberikan arti bahwa masyarakat diposisikan sebagai salah satu pilar penting dan strategis di samping pemerintah dan swasta. Posisi ini juga sekaligus menunjukan bahwa masyarakat bukan hanya sebagai pelaksanaan pembangunan, tetapi disamping itu disamping itu masyarakat juga berperan sebagai perencana dan pengontrol berbagai program pembangunan baik program-program yang datang dari pemerintah maupun program-program yang lahir dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Salah satu diantaranya sebagai kebijakan pemerintah yang berkenan dengan pelibatan masyarakat dalam proses pemnbangunan nasional adalah Program Pembangunan yang datangnya dari dana alokasi desa (DAD).

* 1. **Pembahasan**

 Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun masyarakat kampung Dempar sangat sedikit yang paham artinya partisipasi tetapi proyek pembangunan yang ada tetap dapat berjalan dengan baik, walaupun menggunakan tenaga dari luar dan beberapa masyarakat yang ada. Oleh karena itu partisipasi di kampung Dempar belum dapat menjadi tolak ukur dalam melaksanankan kegiatan pembangunan selanjutnya namun pemerintah kampung Dempar juga tetap berusaha dalam menyampaikan pentinganya partisipasi masyarakat demi kemajuan kampung agar kedepanya masyarakat kampung Dempar semakin sejahtera Menurut Made Patra (Utang Rosidin 2019:175) partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan ini dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimiliki (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan.

Menurut Histiraludin (Handayani 2006:39-40) “Partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohestifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan”

 Dengan adanya keterlibatan itu, maka suatu pembangunan akan bisa dirasakan secara merata, dan tidak hanya oleh pihak-pihak tertentu saja. Pembangunan yang tidak merata adalah karena suatu pembangunan sudah tak memandang arti pentingnya keterlibatan subyek dalam menyelenggarakan pembangunan itu sendiri.

**V**.**PENUTUP**

* 1. **Kesimpulan**

 Meskipun masih terdapat hambatan-hambatan kecil dalam membangun dan mengarahkan partisipasi masyarakat Kampung Dempar, namun secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pembangunan di kampung Dempar berhasil walaupun masyarakat masih enggan untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk partisipasi tenaga.

1. **Partisipasi Pikiran**

Kesimpulan yang dapat di ambil dari partisipasi pikiran adalah pemerintah kampung dempar sudah mengupayakan yang terbaik bagi masyarakat nya dengan mengadakan pembangunan semenisasi jalan adapun dalam partisipasi pikiran pemerintah mengajak masyarakat nya untuk bergabung dalam Musrenbang (Musyawarah rencana pembangunan) untuk berdiskusi tentang perencanaan pembangunan. Rencana ini mendapatkan respon yang cukup baik dari masyarakat karena masyarakat turut serta dalam berpartisipasi pikiran, sehingga masyarakat dan pemerintah menyentujui pembangunan Semenisasi jalan di Kampung Dempar.

1. **Partisipasi tenaga**

dari kelima partisipasi , partisipasi tenagalah yang paling banyak memiliki kekurangan karna partisipasi merupakan partisipasi yang membutuhkan tenaga langsung/orangnya namun yang terjadi dilapangan banyak masyarakat yang tidak mau ikut berpartisipasi karena memiliki kesibukan dan berbagai alasan**,** walaupun tidak semua masyarakat memiliki alasan seperti itu.

1. **Partisipasi Keahlian**

Dalam suatu proyek pengadaan fisik keahlian/skill memang sangat dibutuhkan karena akan menentukan fisik pembangunan seperti apa yang akan dicapai. Jadi pemerintah kampung dempar mengambil inisiatif untuk mengambil sebagian pekerja dari luar dan sisanya dari warga masyarakatnya sendiri. Sehingga pekerjaan yang ada menjadi ringan karena setiap pekerja nya mengerjakan pekerjaan sesuai kemampuan/keahliannya masing-masing.

1. **Partisipasi Barang**

Partisipasi barang yang dimaksud dalam bab ini adalah barang berupa material hasil bantuan atau pemberian masyarakat secara sukarela walaupun dana yang digunakan untuk pembangunan semenisasi terbilang sangat cukup namun masyarakat tetap memberikan bantuan nya secara sukarela berupa paku, semen, palu, parang dan sebagainya alat-alat yang berupa untuk menunjang pembangunan yang ada .

1. **Partisipasi Uang**

Jadi dalam partisipasi uang masyarakat tidak memberikan uang tunai secara langsung untuk kebutuhan pembangunan namun masyarakat memberikannya dalam bentuk makanan dan minuman berupa kopi,the,gula,rokok bahkan beberapa dari masyarakat berinisiatif untuk memasak di rumah salah satu warga kemudian makanan nya dibawa ke tempat pembangunan semenisasi untuk sekedar makan bersama dan hal ini sangat di apresiasikan oleh lembaga adat kampung serta tokoh agama dan pemerintah kampung.

1. Dari lima jenis partisipasi yang dikaji, ternyata bentuk partisipasi barang memiliki sumbangan yang sangat signifikan dalam mengerjakan proyek kegiatan pengadaan fisik khususnya pembangunan SEMENISASI JALAN pada tahun 2019, walaupun penggerjaan nya dilaksanakan oleh pihak k3 (pemegang proyek).
2. Kepala Kampung Dempar beserta aparatnya cukup aktif dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam mendorong dan mengarahkan partisipasi masyarakat walaupun tidak terlalu berpengaruh di kehidupan masyarakat, namun kegiatan pengadaan fisik seperti SEMENISASI JALAN terbilang sangat baik dan berjalan sesuai rencana sebagai mana yang diharapakan oleh masyarakat dan kepala Kampung.
	1. **Saran**
3. Diharapkan agar kepala kampung dan aparatnya semakin gigih dalam berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat Kampung Dempar guna mendapatkan proyek-proyek dimasa yang akan datang sesuai skala prioritas kebutuhan masyarakat desannya.
4. Agar Kepala kampung Beserta jajarannya semakin baik menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan dengan masyarakat desa secara keseluruhan sehingga pertemuan-pertemuan yang mereka selenggarakan di masa yang mendatang dapat melahirkan gagasan-gagasan dan keputusan-keputusan yang lebih baik guna menyukseskan setiap program dan proyek yang telah berhasil diperjuangkan oleh Kepala Desa.
5. Agar kepala kampung dan aparatnya serta tokoh-tokoh masyarakat kampung Dempar senantiasa bersinergi menjadi teladan bagi masyarakat dalam memelihara dan merawat hasil-hasil pembangunan yang dicapai di Kampung Dempar Kecamatan Nyuatan kemudian agar partisipasi masyarakat juga dapat meningkat.
6. Kepala Kampung Dempar agar mendorong warganya untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan di Kampung Dempar Kecamatan Nyuatan dalam bentuk tenaga selain untuk mempercepat pembangunan juga menjalin tali persaudaraan diantara warga desa.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abe, Alexander,2002, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Penerbit Produk Edukasi,Solo.

Arikunto, Lincoln. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta:Rineka Cipta.

Davis, Keith,2019. *Sistem Pemberdayaan Desa dalam Pemerintah Desa*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung.

D Astuti, S Irene 2009. *“Desentralisasi dan Partisipasi dalam Pendidikan”.* Penerbit Yogyakarta:UNY.

Hasbiah. 2018. “*Tinjauan Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Pembangunan Di desa Sanggata Utara Kabupaten Kutai Timur*’’. Fisipol Untag 1945 Samarinda.

Handayani, Suci. 2006. *Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi* (Cetakan Pertama). Surakarta:Kompip Solo

Kuncoro, Mudarjad, 2000, *Ekonomi Pembangunan,Teori Masalah dan Kebijakan,* unit Penerbit dan Percetakan Akademik Manajemen perusahaan YKPN, Yogyakarta.

Kuncoro, Mudarjad, 2004. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah. Jakarta* : Erlanga

Kuncoro,Mudrajad.2004.*Otonomi & Pembangunan Daerah*: Erlangga.

Kunarjo, 2002, *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan,* Universitas Indonesia UI Press, Jakarta.

Mubiyarto, 2000, *Pembangunan Pedesaan,* P3PK UGM, Yogyakarta.

Michael, Todaro, 2000, *Pembangunan Ekonomi di dunia ketiga*, Erlangga, Jakarta.

Ndraha, Talidzuhu. 2003, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta. PT. Asdi Mahasatya.

Rosidin, Utang,2019, *Sistem Pemberdayaan Desa dalam Pemerintah Desa*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung.

Siagian, Sondang. P (2005). *Administrasi pembangunan, Konsep Dimensi dan Strateginya*. Jakarta : Bumi Askaer

Sugiono, 2004. *Metode Penelitian. Bandung* : Alfabeta

Tjokroamindjojo, Bintaro, 1995, *Manajemen Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta

Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi 2: Edisi 5*. Jakarta: PT. Bumi Askara

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

**Sumber Lain :**

Ade Cahyat. 2005. Profil Kampung-kampung Di kutai Barat, <https://kutaibaratkab.go.id> (diakses 8 Januari).

UU No 1 Tahun 2013 Rencana Pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Kutai Barat (SPPN)

<http://nyuatankubar.blogspot.com/2014/10/kapan-menjadi-kecamatan.html?m=1>

hhtps://id.m.wikipedia.org